Kehidupan Spektakuler: Tentang Rezim Kebenaran dan Budaya Pembatalan Sebagai Solidaritas yang Rapuh

Published August 22, 2025 Uncategorized Leave a Comment

> *If I blame them for anything, it's nothing more than I blame on myself.*
>
> *— Bedhead, Smoke (1996)*

Beberapa minggu lalu, aku menjumpai banyak unggahan di media sosial, tentang wafatnya sang legenda musik rock, Ozzy Osbourne. Banyak dari kawanku mengunggah tulisan obituari dengan nada duka yang mendalam, menceritakan pengalaman personal mereka mendengarkan musik Ozzy, dan bagaimana itu memengaruhi kehidupan mereka. Sama halnya dengan diriku yang sebelumnya pernah beberapa kali menulis obituari untuk musisi-musisi yang kuidolakan (utamanya, Ennio Morricone dan Brian Wilson). Aku memahami duka mereka, seperti hal nya aku memahami kekuatan atau potensialitas dari musik.

Musik menurutku punya kualitas jauh dari bentuk atau persepsi kaku terhadap konsep kekaryaan. Berbeda dengan bentuk seni yang lain, ia tidak bersifat statis (*immobile*) melainkan cair dan intrusif; ia seakan-akan punya kesadarannya sendiri, mengisi keseharian bukan hanya sebagai latar, tapi juga mewakili bagian dari diri yang tak terucapkan. Apa yang tak tersentuh oleh kata-kata di dalam ruang-ruang emosional, di situ lah musik berada. Ia membentuk kenangan, merawat luka-luka membandel, atau menjadi semacam navigator di kala tersesat. Aku selalu percaya bahwa musik bukan untuk sekadar didengar, tapi dialami, bahkan diturunkan. Mendengarkan *Adagio* Bach misalnya, bagiku, adalah mengingat dinginnya tembok marmer gedung berdesain *art deco* di bulan September dan aroma parfum seseorang; mendengarkan The Softies adalah mengingat senyuman yang membawa lebih banyak kepedihan. Rasa yang

ditorehkan musik merambat pelan melintasi tubuh dan waktu, menggurat ulang lanskap kesadaran, menggeliatkan lekuk-lekuk baru dalam *geografi batin* yang terus berganti rupa, mengikuti usia yang bertambah dan peristiwa-peristiwa yang membentuk diri.

Aku pun tak pernah sepenuhnya tahu diriku sendiri. Apa yang dinamakan "diri" bagiku adalah lanskap penuh aliran, simpul, dan jalur yang terus berubah. Tidak ada bentuk "diri" yang utuh, mengakui sebaliknya adalah arogansi atau kebodohan tersendiri. Diri manusia bukanlah struktur tertutup, melainkan "tubuh tanpa organ" (meminjam istilah Deleuze & Guattari), medan energi yang selalu dalam proses kemenjadian. Dalam konteks ini, aku berpikir, begitu pun halnya dengan musik. Musik mempunyai kekuatan afektif yang mampu menggambar ulang peta batin, menggeser koordinat emosi, membuka jalur-jalur baru, bahkan menciptakan "deterritorialisasi" (pelepasan) terhadap pengalaman lama. Ia membentuk *geografi batin* dengan cara yang sangat *rhizomatik*, tidak linear, tidak terpusat, dan bisa muncul dari mana saja.

Aku memahami bahwasanya reaksi kawan-kawanku kebanyakan bukan hanya berduka karena kehilangan seorang sosok, tapi sebentuk frekuensi yang pernah menyentuh jutaan hidup (termasuk diri mereka sendiri) dengan cara yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kepergian para musisi terasa amat personal, seolah-olah kehilangan bagian dari masa lalu sendiri. Ini yang kupahami sebagai *hauntology*, perasaan "gatal" di relung batin akan masa depan yang gagal terwujud (*the slow cancellation of future*, yang menjebak pada fase daur ulang estetika di masa lalu), atau nostalgia terhadap masa lalu yang tak pernah sepenuhnya terjadi. Musik, khususnya musik yang didengar di masa lalu, membawa serta semacam "hantu", bukan sekadar memori-memori spesifik; hantu yang mengingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah terjadi.

Selang sehari setelahnya, aku menjumpai sebuah unggahan dari sebuah grup band lokal. Isi dari unggahan tersebut kurang lebih adalah pernyataan sikap mereka terhadap mendiang Ozzy Osbourne, seorang pro-Israel yang melancarkan kampanye propaganda Zionis-Israel, serta ajakan untuk tidak mengkultuskan Ozzy sebagai seorang ikon tanpa cela hanya karena jasanya dalam dunia musik. Aku pribadi bukan penggemar musik Ozzy dan tak peduli dengan kehidupan atau kematiannya. Tidak seperti kawan-kawanku yang lain, kepergiannya tidak berdampak besar terhadap kehidupanku. Melihat unggahan tersebut, aku tak begitu kaget, atau kecewa. Sebab aku tak punya ekspektasi apa-apa padanya. Biasa saja. Hanya kematian lain, pikirku. Kawan-kawanku yang lain mulai ikut sibuk mengunggah ulang unggahan grup band tersebut sambil membatalkan selebihnya. Komentar-komentar warganet yang kulihat dalam unggahan tersebut pun beragam, dari dukungan pasif terhadap rakyat Palestina, seruan untuk memboikot, hingga cemoohan rasis, generalis, dan anti-semit tak karuan (bernada agamis) yang ditujukan kepada Israel sebagai entitas etnis. "Hitler udah bener dulu basmi Yahudi" dan "Yahudi anjing", ungkap salah dua komentar warganet (yang terakhir kucek, sudah dihapus).

Ozzy sendiri setahuku bukan orang Yahudi, tapi istrinya, Sharon Osbourne, memang keturunan Yahudi. Ia sering vokal menentang antisemitisme di berbagai media, dan kerap melakukan ritual-ritual Yahudi di kehidupan keseharian (yang beberapa kali muncul di program televisi *The Osbournes*). Bersama lebih dari 200 tokoh publik, Ozzy dan Sharon menandatangani surat terbuka yang mengecam dugaan bias BBC terhadap Israel dalam film dokumenter konflik Gaza, dan menuntut investigasi independen atas kebocoran editorial yang berdampak pada

citra Israel. Publik menilai tindakan ini sebagai sikap mereka untuk melindungi narasi pro-Israel serta memperkuat citra Israel di media internasional. Ozzy bersama Black Sabbath juga pernah tampil di Israel dua kali: pada Ozzfest Tel Aviv 2010 dan *No More Tours 2* pada 2018. Di konferensi pers 2010, ia mengatakan bahwa keterlambatannya tampil di Ozzfest Tel Aviv bukan soal sikap politik, tapi karena "terlalu banyak mabuk" malam sebelumnya. Ia menyatakan tidak ingin terlibat dalam wacana atau aksi politik yang sedang terjadi karena menurutnya: "Mereka tidak akan bisa memahami diriku, begitupun sebaliknya."

Apa yang terjadi dengan Ozzy di sini adalah pembatalan. Budaya membatalkan (*cancel culture*) memang sedang menjadi polemik sengit di publik media sosial, khususnya di zaman budaya tersadar (*woke culture*) pasca-internet seperti sekarang. Semenjak media digital menjadi ruang pokok di mana interaksi kerap terjadi, reputasi seseorang tak lagi ditentukan oleh proses panjang atau dialog kritis yang mendalam, tetapi oleh viralitas dan opini sesaat. Jika *woke culture* adalah mimpi tentang masyarakat ideal, maka *cancel culture* adalah alatnya, untuk membersihkan diri dari elemen-elemen yang dianggap "kotor", keliru, atau tidak sejalan. Penghakiman massal bisa terjadi dalam hitungan jam sesaat setelah sebuah kesalahan tersebar, entah itu lewat cuitan lama, video yang dipotong, atau sikap yang tak sejalan dengan mayoritas. Opini publik mudah sekali berubah menjadi semacam palu pengadilan, bukan untuk menggali kebenaran, tapi untuk memuaskan kebutuhan akan gratifikasi moral yang instan. Apa bedanya dengan kerumunan yang dulu bersorak di balik propaganda fasisme atau otoritarianisme, yang menyerahkan penilaian moral pada suara mayoritas dan rasa puas karena melihat seseorang "dijatuhkan", menjadi semacam pola *schadenfreude* yang paling bengis?

Aku memahami bahwa *cancel culture* tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari rasa frustrasi, ketegangan sosial-politik yang mengental di zaman ketika rasa keadilan publik meningkat, tapi akses terhadap perubahan struktural tetap terbatas. Ia adalah respon yang muncul dari rasa ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang terlampau korup dan Negara sebagai institusi yang gagal memantapkan keadilan. Tapi jika *cancel culture* ingin benar-benar menjadi bagian dari perjuangan etis, ia *harus* ditopang oleh analisis struktural, kepekaan konteks, dan kemampuan untuk memilah siapa yang patut disasar, dan siapa yang justru perlu dilindungi.

Siapa pun yang mengenalku cukup lama tahu, bahwasanya aku tidak pernah mempermasalahkan pilihan siapa pun yang membela kedaulatan Palestina dan mengecam doktrin kolonialis, politik apartheid, dan pogrom Zionis-Israel. Sebaliknya, aku justru menaruh harapan besar terhadap banyaknya dukungan terhadap Palestina: bahwa penjajahan atau kolonialisme dalam bentuk apapun (apalagi disertai dengan tindakan genosida i.e. penghapusan terorganisir terhadap suku/ras/kelompok religius tertentu seperti di Auschwitz atau Srebrenica), adalah kejahatan terhadap hak manusia untuk hidup dan berdaulat, maka ia patut dibela. Keberpihakan total pada Palestina maka adalah sikap perjuangan etis (dan politis) yang sah dalam melawan segala bentuk struktur penjajahan dan imperialisme yang masih eksis sejak peristiwa *nakba* pertama tahun 1948. Ia sekaligus memberi ruang bagi suara orang-orang Palestina yang termarjinalkan. Yang menjadi masalah bagiku adalah, ketika isu Palestina justru dijadikan alat tolak ukur moral *perseorangan*. Ketika pembatalan terjadi tanpa membedakan antara dukungan terhadap Israel sebagai negara Zionis dan identitas Yahudi sebagai kelompok etnis-religius, menjadi ajang *virtue signaling* yang membuat risiko anti-semitisme menjadi sangat nyata (seperti yang dicerminkan oleh reaksi kebanyakan warganet Indonesia terkait isu Israel-Palestina yang menurutku dangkal bahkan telak rasis). Mengecam Zionisme itu semestinya bukan menyerang atau malah menghalalkan darah orang-orang Yahudi. Mengecam Zionisme artinya mengkontekstualkan warisan sejarah mereka (orang-orang Yahudi) sendiri yang dipenuhi oleh doktrin dan manipulasi. Perjuangan untuk keadilan tidak bisa berjalan di atas generalisasi atau kebencian kolektif. Imbas dari sikap tersebut adalah seruan solidaritas yang berubah menjadi seleksi moral, yang menolak pendapat berbeda sekaligus membatalkan keberadaan seseorang, *bukan* karena ia mendukung aksi kekerasan, genosida, atau kolonialisme, atau karena ia adalah individu korup yang layak mendapat sangsi atau hukuman, tapi hanya karena ia tak cukup "suci" di mata publik. Solidaritas yang seharusnya membebaskan (menjadi katarsis, aktualisasi diri) justru kerap menjelma menjadi polarisasi buta, gerbang masuk ke dalam *purifikasi politik*.

Segala bentuk purifikasi, apalagi dalam konteks ideologis, adalah kekeliruan. Aku membenci tindakan-tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain, apalagi itu berujung pada bentuk perampasan hak-hak (untuk hidup dan berdaulat, contohnya). Tapi lebih daripada itu, aku membenci kemunafikan. Menganggap diriku selalu lebih baik dan lebih "suci" dari orang lain adalah bentuk *bad faith*. Seolah-olah, jika dihadapkan pada situasi atau kesempatan yang sama, dengan konteks kehidupanku yang berbeda, aku akan mampu seratus persen menangkal segala hal yang berbeda dari keyakinanku sekarang. Aku tahu kebebasan dan batasanku sendiri, tahu nilai yang kupegang sendiri, tapi aku juga tahu bahwasanya aku hanya manusia biasa yang rentan terhadap pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan burukku sendiri dan bertanggung jawab atasnya. Dan itu mengubah semuanya.

> *To be crushed is not to be*
> *held down by some minor influence*
> *It's to be left alone with*
> *nothing to understand*
>
> *— Bedhead, Crushing (1994)*

Dalam salah satu wawancaranya, Michel Foucault sempat berbicara tentang "rezim kebenaran" (*regime of truth*), bagaimana kebenaran tidak selalu muncul dari fakta, tapi dari siapa yang punya kuasa untuk mendefinisikannya. Bukankah ini yang juga sering terjadi sekarang? Sikap atau opini seseorang lebih ditentukan oleh ketakutan terhadap kemungkinan akan pengasingan yang dibentuk oleh relasi-relasi kuasa, ketimbang pemahaman holistik dan bernas terhadap isu-isu tertentu. Di era pasca-internet, algoritma menjadi tolak ukur kekuasaan, opini yang paling keras, atau paling banyak disukai, adalah yang paling "benar". Perang kebenaran menjadi perang algoritma, dan perang algoritma adalah perang representasi, bukan substansi. Yang viral menggantikan yang valid. Yang emosional menyingkirkan yang "rasional". Kebenaran tak lagi didekati sebagai proses dialektika, melainkan sebagai produk: dikurasi, dipasarkan, lalu dikonsumsi dalam waktu singkat sebelum digantikan oleh narasi baru (yang belum tentu terbukti kebenarannya). Algoritma menjadi panoptikon baru: tidak terlihat namun mengatur pandangan, membentuk opini, mengarahkan empati. Di sinilah menurutku mengapa *cancel culture* menjadi sangat berbahaya bagi siapa saja untuk jangka panjang, karena ia tak lagi membuka ruang untuk perubahan, tapi hanya menyediakan dua pilihan: dihukum atau dibela, tidak ada di antaranya.

Beberapa waktu lalu, Whiteboard Journal mengunggah sebuah opini tentang pembelaan mereka terhadap budaya tersadar (*woke culture*) menggunakan referensi dari budaya pop seperti film distopis *The Hunger Games*. Dalam unggahan tersebut, mereka mengkritik bagaimana "ketersadaran*" (wokeness)* dewasa ini kerap disalahpahami sebagai sesuatu yang negatif, bahkan derogatoris. Menurut mereka, kesalahpahaman tersebut memberikan celah bagi kekuatan-kekuatan konservatif untuk mendiskreditkan solidaritas atau perjuangan terhadap isu-isu politik yang terjadi di sekitar, seperti ketidakadilan, rasisme, seksisme, dan sebagainya. Sementara itu ada benarnya, tapi kupikir juga bisa bekerja sebaliknya.

Istilah *woke*, yang awalnya bermula dari kesadaran terhadap ketidakadilan rasial (khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat kulit hitam di Amerika, sebagai bagian dari politik identitas), kini telah berkembang menjadi istilah umum untuk kesadaran sosial terhadap berbagai bentuk ketimpangan: gender, identitas, lingkungan, kolonialisme, dan sebagainya. Dalam konteks ini, *woke culture*, diakui saja, adalah ekspresi utopis—keinginan ideal di mana setiap orang diperlakukan secara adil, pembohongan sejarah diperbaiki, dan struktur penindasan dibongkar. Namun, seperti banyak dari proyek-proyek utopis dalam sejarah, ia juga rentan terhadap dogma. Alih-alih menjadi ruang dialog, ia bisa berubah menjadi ruang penyaringan moral yang ketat: siapa yang dianggap tidak cukup "sadar", harus segera disingkirkan dari ekuasi. *Cancel*.

Dari perspektif Stirnerian, akar permasalahan dalam politik identitas semacam ini adalah *spektre*, yakni penggunaan sebuah kategori identitas sebagai kategori transenden dan abstrak (seperti makhluk transparan yang mengendalikan) yang memiliki serta menentukan nilai-nilai. Menurut Stirner, masalah penindasan yang kerap terjadi terletak pada kenyataan bahwa orang-orang lebih menghargai *spektre* dan segala sesuatu yang menguntungkan *spektre*, alih-alih menghargai hal-hal yang mereka inginkan sebagai seorang *yang unik* (*unique one*). Semua kategori, kata, konsep, bisa menjadi *spektre* bila seseorang membiarkannya mengendalikan dan mendominasi dirinya (kemanusiaan, keadilan, suku, agama, dll). Jika manusia hanya didefinisikan secara esensial dan utama sebagai sesuatu-sesuatu itu, hal ini malah bisa bersifat mengasingkan. Sebab kategori itu selalu "hakikat dirinya, bukan dirinya sendiri," dan karenanya menjadi sesuatu yang

asing. Manusia nyata, semestinya, adalah makhluk yang bersifat prosesual, diri yang terus berinkarnasi, yang terletak dalam sebuah medan *menjadi*.

Sistem penindasan seperti imperialisme, kolonialisme, rasisme, atau bahkan patriarki, adalah bentuk pemaksaan dari suatu *spektre* tertentu. Sistem penindasan berbasis gender, ras, dan sebagainya memang secara sosiologis nyata, tetapi pada akhirnya berakar dari seseorang yang *memaksakan sebuah spektre tertentu* kepada orang lainnya—memperlakukan orang lain bukan sebagai sosok/individu yang unik, melainkan sebagai representasi dari kategori-kategori (*spektre*) yang lain, atau sekadar "X yang lain." Sistem semacam itu berarti mengutamakan nilai sebuah kategori (Negara, suku, agama, dll) dengan mengorbankan kategori lain, yang kemudian melahirkan kekerasan terhadap mereka yang tersingkir. Seorang Yahudi bisa dilihat hanya sebagai "Zionis" meski ia kritis terhadap Israel dan Zionisme. Seorang Palestina bisa dipandang sebagai "teroris" meski ia hanya seorang petani, guru, atau penyair. Identitas yang seharusnya cair dan penuh detail kehidupan sehari-hari, direduksi menjadi satu *spektre* abstrak. Inilah bentuk alienasi yang Stirner maksud: ketika individu kehilangan "keunikan" karena dipaksa hidup di bawah kategori-kategori besar yang asing.

Di Tiongkok pertengahan tahun 1960-an, Mao Zedong memberikan mandat kepada Red Guards-nya (kelompok pemuda Kiri di bawah naungan CCP/Partai Komunis Tiongkok, umumnya pelajar) untuk "menyingkirkan unsur borjuis, feodal, dan kapitalis", kesemuanya *spektre*, dari masyarakat Tiongkok. Agenda "pemurnian" ini adalah cikal bakal dari Revolusi Kebudayaan yang berlangsung kurang lebih satu dekade (1966-1976). Dalam praktiknya, mereka (Red Guards) menghancurkan simbol-simbol budaya lama (patung, buku, karya seni); melakukan prosesi *public shaming* kepada para intelektual lama (penulis, akademisi, pengajar); serta menghakimi orang-orang atas "kesalahan ideologis" yang mereka lakukan di masa lalu. Dengan melakukan pemurnian total, mereka percaya bahwa masyarakat komunis yang ideal bisa dicapai. Tanpa kompromi.

Tentu, menyamakan sepenuhnya fenomena *cancel culture* dengan Revolusi Kebudayaan di Tiongkok juga merupakan kekeliruan. Sebab, fenomena *cancel culture*—berbeda dengan Revolusi Kebudayaan—adalah fenomena *desentralistik* dan bersifat *horizontal*. Ia tidak disokong atau digerakkan oleh Negara, tidak melibatkan kekerasan fisik yang nyata (setidaknya, tidak terlalu banyak, karena

medan peperangannya adalah media sosial), dan lebih didorong oleh motif emosional (moral kolektif) ketimbang ideologis. Tapi, mengabaikan kesamaan di antara keduanya, juga bentuk bias tersendiri. Di mataku, keduanya berbagi mekanisme sosial yang meresahkan: pemurnian moral, pengadilan massa, dan pembatalan simbolik terhadap orang yang dianggap "menyimpang". Revolusi Kebudayaan dikenal dari aksi penghancurannya terhadap warisan-warisan budaya, teks, artefak, dan juga simbol-simbol yang dianggap mewakili masa lalu yang korup. Demikian pula *cancel culture* yang sering kali menargetkan figur publik yang sebelumnya dikagumi (seperti Ozzy) dan mencoba menghapus pengaruh mereka dari ruang publik, termasuk karya-karya mereka, meskipun kontribusinya dianggap signifikan.

Siapa pun yang mempraktikkan *cancel culture*, bertindak dengan asumsi bahwa mereka adalah suara kebenaran moral. Tidak ada mekanisme banding yang adil (bila masih peduli dengan keadilan). Sekali divonis, maka seseorang dianggap layak untuk kehilangan pekerjaannya, reputasinya, atau bahkan keselamatannya. Hak-hak nya dicerabut. Keadilan restoratif menjadi gumaman usang yang tak layak lagi muncul ke permukaan, sebab di era pasca-internet, sangsi atau penghukuman sosial ada di tangan masing-masing, instan, tanpa pengampunan, dan abadi.

Aku teringat dengan serial *The Good Place* dan *BoJack Horseman*. Serial-serial tersebut adalah metafora yang tepat untuk menggambarkan dunia sekarang, di mana setiap orang hidup dalam bayang-bayang sistem nilai yang terus menuntut kesempurnaan, dan menghukum keterlambatan kesadaran sebagai dosa yang tak terampuni. Dalam serial *BoJack Horseman*, BoJack bukan sekadar dibatalkan karena satu kesalahan yang ia lakukan. Ia dibatalkan karena serangkaian tindakan (seringnya dalam ruang pribadi) yang pernah ia perbuat. Segala upaya dirinya untuk memitigasi kekeliruan, justru memperkeruh keadaan, menyingkap kenyataan bahwa ia lebih peduli tentang citra daripada penyesalan. Di sinilah BoJack Horseman menolak menjadi moralistik. Ia tahu bahwa dunia *cancel culture* selalu tergesa membentuk opini, membentuknya menjadi seorang pribadi yang getir dan pesimis. Namun ia juga memahami bahwa korban-korban dari tindakannya tidak boleh dikesampingkan demi narasi penebusan, membuatnya terjebak dalam pergelutan antara keinginan untuk dimaafkan dan rasa tanggung jawab untuk menerima hukuman. Ia (dan kuyakin, mayoritas orang) adalah pribadi yang kubayangkan cocok untuk berada di limbo yang dibayangkan serial *The Good Place*. Sebab, dalam serial tersebut, tidak ada seorang pun dianggap pantas untuk masuk ke "surga", *the good place*. Karena setiap tindakan, betapapun kecil, memiliki konsekuensi moral yang tak terlihat.

Dari kedua serial tersebut aku lantas melihat di mana paradoks *cancel culture* sebagai bagian dari politik identitas terletak. Di satu sisi, kita hidup dalam masyarakat yang mengagung-agungkan kesadaran kritis, akuntabilitas, dan kesetaraan nilai. Tapi di sisi lain, kita juga hidup dalam zaman di mana ekspektasi personal terhadap seseorang berubah menjadi tuntutan moral yang tidak manusiawi, seolah-olah manusia harus menjadi simbol absolut dari kebenaran yang tak bercacat.

Siapa manusia di muka bumi ini yang tanpa cela? Tanpa kekeliruan? Keliru menurut siapa? Di mana kebenaran yang tanpa beban?

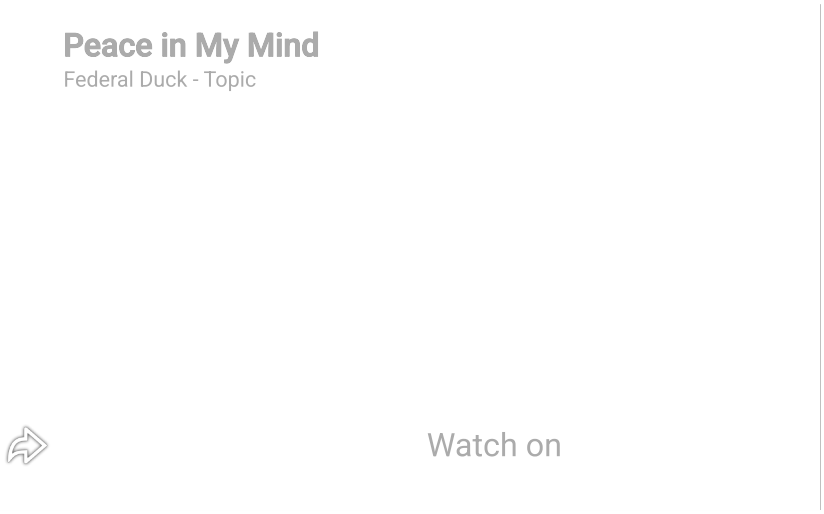

0 Responses to “Kehidupan Spektakuler: Tentang Rezim Kebenaran dan Budaya Pembatalan Sebagai Solidaritas yang Rapuh”

Leave a Comment

Leave a comment